BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, penulis menarik kesimpulan, di antaranya:

1. Pemegang polis dan pekerja pada perusahaan asuransi pailit berkedudukan sebagai kreditur preferen. Dapat dikatakan terdapat pertentangan atas pemenuhan hak terhadap pemegang polis dengan pekerja. Maka untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan tersebut diperlukan asas hukum. Dalam hal ini menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan baru mengabaikan yang lama. UU Perasuransian adalah ketentuan yang lebih lama dibandingkan UU Pengganti Cipta Kerja, maka dengan demikian kedudukan pekerja pada perusahaan asuransi yang diputuskan pailit berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang polis.
2. Perusahaan asuransi yang dijatuhkan pailit membuat hukum di Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum pada pemegang polis dan pekerja. Ketentuan pemegang polis tersebut diatur pada KUH Perdata, POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU kepailitan dan PKPU serta UU Perasuransian. Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur pada KUH Perdata, UU Kepailitan dan PKPU, PP Pengupahan, UU Pengganti Cipta Kerja, serta Putusan MK No.67/PUU-XI/2013. Namun,

pemenuhan hak antara pemegang polis dengan pekerja, maka pihak pekerja yang harus didahulukan pembayarannya.

B. Saran

1. Hendaknya dalam UU Kepailitan dan PKPU mengatur dan memperhatikan hak para kreditur secara komprehensif, sehingga setiap kreditur dapat memahami serta menerima hak yang seharusnya diterima ketika debitur mengalami pailit.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan pekerja memang sudah diatur pada peraturan-peraturan di Indonesia. Namun, mengingat belum adanya lembaga polis di Indonesia, maka pemerintah sebaiknya membentuk lembaga yang menjamin polis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian dan seharusnya sudah terbentuk tiga tahun sejak diundangkannya UU Perasuransian.